

LAMPIRAN

WAWANCARA KEPALA BPPKAD KABUPATEN MESUJI

A. Identitas Informan

1. Nama : Adi Sukamto,S.Pd
2. Umur : 55 Tahun
3. Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara
4. Jabatan : Kepala BPPKAD Kabupaten Mesuji
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Alamat : Kompleks Perkantoran Pemkab Mesuji

B. Hasil Wawancara

Pada saat PBB-P2 masih menjadi dana perimbangan, dana yang dihasilkan oleh PBB-P2 cukup tinggi dibandingkan setelah menjadi Pendapatan Daerah. Maka dari itu BPPKAD Kabupaten Mesuji menyupayakan ketersediaan dana yang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan PBB-P2.

Dalam menetapkan strategi peningkatan penerimaan PBB, BPPKAD Kabupaten Mesuji menyusun rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) setiap tahunnya.

Renja-OPD tersebut disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya dan analisis kinerja pelayanan BPPKAD Kabupaten Mesuji dengan memperhitungkan analisis internal dan analisis eksternal.

Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja- OPD) adalah perencanaan OPD yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra- OPD). Renja-OPD tersebut nantinya akan dilaporkan secara periodik setiap bulannya melalui laporan pelaksanaan kinerja bulanan dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh perkembangan pelaksanaan tugas BPPKAD, memperoleh informasi tentang permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, dan menemukan alternatif/ upaya pemecahan masalah yang bisa/ akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dalam hal ini target penerimaan PBB-P2 pasca implementasi UU Nomor 28 Tahun 2009.

Setelah membuat Renja-OPD, BPPKAD Kabupaten Mesuji menetapkan tujuan dan sasaran sebelum akhirnya membuat strategi kebijakan untuk mencapai

sasaran peningkatan penerimaan PBB-P2 pasca implementasi UU Nomor 28 Tahun 2009. Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu dan bersifat idealistik, sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh BPPKAD Kabupaten Mesuji dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan serta memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan yang dapat menggambarkan secara spesifik hasil yang akan dicapai.

WAWANCARA KEPALA BIDANG PBB DAN BPHTB BPPKAD KABUPATEN MESUJI

A. Identitas Informan

1. Nama : Endra Oktavandi,S.T
2. Umur : 41 Tahun
3. Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara
4. Jabatan : Kabid PBB dan BPHTB Kabupaten Mesuji
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Alamat : Kompleks Perkantoran Pemkab Mesuji

B. Hasil Wawancara

Langkah-langkah yang dirumuskan oleh BPPKAD Kabupaten Mesuji untuk peningkatan PBB-P2 sesuai yang terjadi dilapangan yaitu :

- 1) Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan data wajib pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendaftaran dan pendataan wajib pajak sehingga dapat disinkronkan dengan data desa dan kabupaten.
- 2) Terwujudnya akuntabilitas penelitian dan penetapan wajib pajak daerah melalui ketepatan penelitian dan penetapan wajib pajak dengan melakukan pemutakhiran data disetiap desa untuk mengetahui wajib pajak yang belum terdaftar dan memperbaiki data-data kepemilikan.
- 3) Peningkatan pendapatan daerah dengan cara :
 - a) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
 - b) Meningkatkan penegakan hukum
 - c) Meningkatkan kompetensi aparat dengan mendorong kepala desa dan perangkatnya untuk melakukan pendataan ulang di setiap desa.
 - d) Pemberian insentif Wajib Pajak yang taat dan kolektor pajak di desa-desa.
 - e) Mengejar wajib pajak yang ada diluar kabupaten.
- 4) Terwujudnya pelayanan prima dibidang pengelolaan pendapatan daerah yang meliputi:
 - a) Menyusun peraturan daerah tentang pengelolaan pendapatan daerah
 - b) Menyempurnakan pengelolaan sistem informasi pajak Mesuji
 - c) Melakukan evaluasi secara berkala atas pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia.

Sebagai salah satu sumber penerimaan yang cukup potensial, pemerintah Kabupaten Mesuji telah melakukan beberapa upaya/strategi untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 pasca implementasi UU Nomor 28 Tahun 2009 di Kabupaten

Mesuji. Dengan demikian, kontribusi PBB-P2 terhadap pendapatan daerah dapat terus meningkat. Sampai saat ini strategi dan upaya yang telah dilakukan oleh BPPKAD Kabupaten Mesuji untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 pasca implementasi UU Nomor 28 Tahun 2009 antara lain Membentuk Tim Intensifikasi PBB, Membentuk Satgas PBB di kecamatan, Sosialisasi SPPT ke masyarakat lewat spanduk-spanduk terutama ketika menjelang jatuh tempo, Menerbitkan surat himbauan kepada wajib pajak / Surat Tagihan Pajak (STP) dan melakukan *door to door*, Pendataan Ulang Terhadap Wajib Pajak, Pemberian Penghargaan dan Sanksi Kepada Wajib Pajak dan Petugas Pemungut Pajak

WAWANCARA KEPALA BIDANG PENDAPATAN BPPKAD KABUPATEN MESUJI

A. Identitas Informan

1. Nama : Prasetyo Yura,S.H,M.M
2. Umur : 31 Tahun
3. Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara
4. Jabatan : Kabid Pendapatan Kabupaten Mesuji
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Alamat : Kompleks Perkantoran Pemkab Mesuji

B. Hasil Wawancara

Pendapatan Daerah setelah PBB-P2 bukan lagi menjadi penerimaan dana perimbangan Kabupaten Mesuji bahwa Semenjak PBB-P2 menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang bukan berasal dari dana perimbangan maka secara tidak langsung pendapatan daerah menurun dibanding pada saat PBB-P2 menjadi dana perimbangan, tetapi hal tersebut bisa jadi keuntungan bagi kabupaten karena setelah PBB-P2 menjadi pajak daerah maka pemerintah daerah dapat mengelola pajaknya sendiri untuk kemaslahatan kehidupan Kabupaten Mesuji.

WAWANCARA CAMAT PANCA JAYA KABUPATEN MESUJI

A. Identitas Informan

1. Nama : M.Taufiq Widodo,S.IP,M.IP
2. Umur : 36 Tahun
3. Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara
4. Jabatan : Camat Panca Jaya Kabupaten Mesuji
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Alamat : Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji

B. Hasil Wawancara

Terdapat janji-janji dari kepala desa pada saat mencalonkan diri sebagai kepala desa yaitu jika terpilih akan membayarkan pajak PBB-P2 masyarakatnya. dimana pada kenyataannya setelah terpilih kepala desa tersebut tidak mampu membayarkan pajak PBB-P2 masyarakatnya dikarenakan jumlah tagihan yang meningkat yang tidak sesuai dengan prediksi kepala desa tersebut